

**ABSTRAK PENELITIAN BERBASIS HIBAH
UNGGULAN PERGURUAN TINGGI
(U.P.T)
TAHUN 2015**



Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M)
Universitas Hasanuddin
Kampus Unhas Tamalanrea
Jln. Perintis Kemerdekaan KM. 10 Makassar
Telp. : 0411 587032, , 582500, 588888 Fax.(0411) 587032, 584024
Website : <http://www.unhas.ac.id/lppm> email : lp2m@unhas.ac.id

BIDANG ILMU EKOSOSBUDKUM BIDANG KAJIAN HUKUM

BATAS RUANG LINGKUP KEWENANGAN DPRD DALAM PENGANGGARAN DAERAH

Juajir Sumardi, Aminuddin Ilmar, Naswar dan Achmad

ABSTRAK

Penelitian ini berupaya mengungkapkan hakikat fungsi anggaran DPRD dalam proses penganggaran. Pengungkapan tersebut akan memberikan kejelasan mengenai batas ruang lingkup kewenangan DPRD dalam kegiatan penganggaran. Selain itu, juga akan mengungkapkan realitas praktiknya dari sudut DPRD. Upaya tersebut diawali dengan mendeskripsikan kedudukan dan (esensi) fungsi DPRD dalam proses perencanaan pembangunan dan penganggaran pemerintahan daerah, mengkaji dn dengan proses penganggaran dan realitas praktiknya dari sudut DPRD, diakhiri dengan melahirkan simpulan dan rekomendasi. Deskripsi, analisis, kajian dan pengungkapan merujuk pada data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka atau studi dokumen, dan data primer melalui wawancara secara bebas terpimpin terhadap para anggota DPRD di lokasi penelitian, khususnya pada alat kelengkapan DPRD yang bertugas membahas anggaran. Hasil penelitian mengungkapkan dua hal, yaitu, pertama, fungsi anggaran DPRD secara hakiki adalah pengawasan fiskal. Mengawasi pada saat perencanaan anggaran. Hakikat yang demikian menempatkan kegiatan pembahasan anggaran oleh DPRD sebagai perwujudan penggunaan fungsi pengawasan fiskal yang bertujuan menjamin kesesuaian: (1) rancangan KUA dan PPAS dengan RKPD; dan (2) rancangan Perda APBD dengan KUA, PPAS dan RKPD, dengan lingkup bahasan dibatasi pada hal-hal berikut: (a) kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan; (b) program prioritas dan plafon/pagu anggaran untuk setiap program; dan (c) alokasi anggaran program dan kegiatan. Kedua, pembahasan rancangan Perda APBD yang secara teknis dilaksanakan oleh komisi, menjangkau sampai dengan tingkat kegiatan dan jenis belanja. Lingkup bhasan yang demikian ini tidak hanya berpotensi menimbulkan transaksi anggaran, tetapi juga melampaui batasan yang ditentukan dalam UU No. 23 Tahun 2014 dan peraturan pelaksanaannya in casu PP No. 58 Tahun 2005 jo. Permendagri No. 59 Tahun 2007. Rekomendasi yang ditawarkan adalah menyesuaikan ketentuan UU No. 17 Tahun 2003 pada UU No. 23 Tahun 2014 terkait dengan lingkup bahasan rancangan Perda APBD, dan juga merevisi PP No. 16 Tahun 2010 untuk menegaskan posisi Banggar atau Pansus selaku alat kelengkapan DPRD yang secara teknis membahas rancangan Perda APBD, guna menjadi pedoman bagi DPRD dalam merevisi peraturan tata tertibnya.

Kata kunci :

ABSTRACT

Limited scope of local house of representative authority in local budgeting. Juajir Sumardi, Aminuddin Ilmar, Naswar, and Achmad as researcher leader and reseacrher team, respectively. This research is to reveal the nature of the functions of the local house of representative (called DPRD) in budgeting process. This means to provide clarity about the limited scope of local house of representative authority in budgeting activities. The effort is commenced to describe the legal standing and the nature of DPRD function in the process of developmental planning and budgeting of the local government. It is also to discuss and analysis the limited scope of DPRD authority in realizing of the fuction related to budgeting process and its practice pursuant to DPRD point of views. Description, analysis, and discussion are referred not only to secondary data that are applied through study of library or documents, but also through primary data. The Primary data is applied through interview to the members of DPRD, especially the commission that has tasks to discuss the budget. The research results reveal two things: first, the function of local house of representative is essentially to control fiscal. It means that budgeting discussion activities conducted by DPRD is to ensure compliance: (1) designing KUA, PPAS, and RKPD; and (2) desinging the draft of the local regulation on APBD and KUA, PPAS, as well as RKPD, with the limited scope of discussion, as following: (a) policy of revenue, expenditure, and financing; (b) program priorities and limited (plafond) budget for each program; and (c) the allocation of the budget and program of activities. Second, the discussion of the draft of the local regulation on APBD technically conducted by theCommissionthat must reach all level of activity and type of expenditure. The scope of such discussion is not only potentially causes budgetary transactions practice, but also exceeds the limit of the Law No. 23 of 2014 and its implementation in the forms of the the Governmental Decree No. 58 , 2005 and the Ministry of Internal Affairs Decree No. 59, 2007. The recommendation offered in to connect between the Law No. 17, 2003 and the Law No. 23. 2014 related to fi scope of the Draft of PERDA on APBD. It is also to revise the Government Decree No. 16, 2010 asserting the position of Commission (Banggar) as a tool of DPRD to discuss the Draft technically.

Keywords :